

Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan
Volume 15 Nomor 1, Februari 2021 Hal 427-443
ISSN 2088-5008
E-ISSN 2722-4104

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DESA DAN
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran)**

Sri Rahayu Maulana¹
sri.rahayu123759@gmail.com

Lilis Saidah Napisah²
lilissaidah2026@yahoo.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (2) Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (3) Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Populasi penelitian sebanyak 60 aparatur pemerintah desa di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Menggunakan metode sensus Kuesioner di uji validitas dan uji reliabilitas sebelum penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan pengujian hipotesis uji t dan uji f. Hasil penelitian menunjukkan (1) Terdapat Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (2) Terdapat Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (3) Secara Simultan Terdapat Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Kata Kunci : Kompetensi, Aparatur Pemerintah Desa, Pengendalian Internal, dan Pengelolaan Keuangan Desa

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan bahwa implementasi otonomi daerah sudah diserahkan kepada desa, sehingga

desa memiliki wewenang untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, sehingga perlu adanya partisipasi dari berbagai kalangan agar pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dan tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengertian pengelolaan keuangan desa itu sendiri adalah keseluruhan kegiatan yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, dan juga pembinaan dan pengawasan yang mana :

1. Perencanaan, meliputi perancangan APBDes yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang kemudian dibahas oleh Badan Pemusyawaratan Desa untuk disepakati dan kemudian dievaluasi dan disahkan oleh Bupati.
2. Pelaksanaan, meliputi bagaimana pelaksanaan pemerintahan desa itu sendiri apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada, apakah sudah sesuai dengan APBDes atau RPJM yang sudah dirancang, disepakati dan disahkan.
 1. Penatausahaan, meliputi pencatatan setiap penerima dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan yang dilakukan oleh bendahara yang kemudian dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban.
 2. Pelaporan, meliputi penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester awal dan akhir kepada Bupati.
 3. Pertanggungjawaban, meliputi penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran dan juga laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa.
 4. Pembinaan dan Pengawasan, meliputi pembinaan dan pengawasan dalam pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten kepada desa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Dana yang dialokasikan kepada setiap desa memiliki jumlah yang cukup besar sehingga dengan begitu pemerintah seharusnya membuat peraturan tentang pengelolaan keuangan desa dengan diimbangi kompetensi aparatur pemerintah desa yang mumpuni dan diterapkan pengendalian internal untuk memastikan tersalurkan anggaran dan tercapainya tujuan untuk

mengamankan aset-aset yang dimiliki oleh desa agar tidak dikuasai oleh pihak lain. Pengelolaan keuangan desa menjadi penting dengan adanya peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan desa maka dana yang diterima akan dikelola secara tepat guna dan tepat sasaran dengan kata lain agar dana yang diterima digunakan dengan semestinya yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa agar desa semakin makmur dan sejahtera, dan tidak terjadi penyelewengan dana atau korupsi yang dilakukan aparat pemerintah desa. Dalam Pemendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berada di Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD berasal berasal dari unsur perangkat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara. Keuangan desa juga dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengendalian Internal dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan karena besarnya dana yang dikelola desa, dana tersebut yaitu pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana desa, alokasi dana desa, bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, sehingga apabila desa menerapkan pengendalian internal dalam proses kerjanya maka aparat pemerintah desa dapat bekerja sesuai dengan kebijakan dan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dan memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi dan menjalankan amanah yang diberikan oleh Pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memiliki harapan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan pembangunan desa. Namun terdapat kekhawatiran yang besar yaitu ketidaksiapan aparat pemerintah desa akan mengakibatkan pengelolaan keuangan desa tidak transparan, finansial dana desa yang besar apabila tidak dilakukan dengan cara transparan maka berpotensi terjadi penyimpangan.

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hadirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, begitu besarnya perhatian para pihak terhadap desa, tidak lain akibat begitu besarnya pemberian dana desa yang jumlahnya makin besar oleh Pemerintah (pusat). Keseriusan Pemerintah untuk memajukan desa tidak hanya mengandalkan ketersediaan regulasi. Namun Pemerintah membutuhkan dukungan dari *stakeholders*, agar tujuan pemerintah memperbaiki dan memajukan desa dapat terwujud melalui subsidi dana desa, untuk itu kita memerlukan para

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mempunyai kapasitas. Mereka harus memahami dan mengerti isi regulasi tentang desa. Apabila tidak pastinya pengelolaan keuangan desa akan mengalami masalah ke depannya.

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban pemerintah salah satunya dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Desa. Dalam Pengelolaan Keuangan yang baik, pemerintah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten yang di dukung latar belakang akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman bidang keuangan (Warisno, 2008).

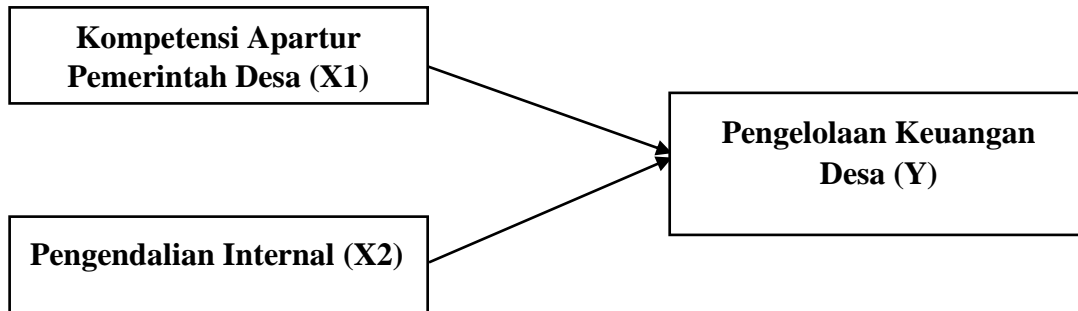
Peneliti Sebelumnya, Amran (2009:2397-2413) dalam Jurnal Iehsan Gorontalo menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah salah satu factor yang menentukan keberhasilan suatu instansi, dengan adanya sumber daya yang berkompeten tentu akan mempengaruhi terhadap Pengelolaan Keuangan yang dihasilkan.

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pemerintah menetapkan adanya suatu system pengendalian intern yang harus dilaksanakan, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Pengendalian internal dimaksud adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern tersebut berguna untuk mengendalikan kegiatan pemerintahan dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, akuntabel.

Oleh karena itu pengendalian internal dapat terwujud jika aparatur pemerintah desa memiliki kompetensi yang memadai dan memiliki profesionalisme yang tinggi agar mampu melaksanakan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan yang bermuara pada pemberian pelayanan prima kepada masyarakat salah satunya pengelolaan keuangan yang baik dan benar.

Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa pemerintah harus memiliki Aparatur Desa yang berkompeten dan berpedoman pada Pengendalian Internal Pemerintah.



Gambar 1 Paradigma Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:98) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan perumusan dan kerangka pemikiran, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- H1 : Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
- H2 : Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
- H3 : Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Maksudnya memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer, yaitu data yang diperoleh menggunakan instrumen kuesioner.

Metode penelitian ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pada umumnya teknik pengambilan sample dilakukan secara random, pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, analisis, data bersifat kuantitatif atau statistic dengan tujuan untuk menguji hipotetis yang telah ditetapkan sebelumnya. (Sugiyono, 2015:14).

Sedangkan penelitian asosiatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Bentuk hubungannya adalah hubungan sebab akibat atau variabel satu mempengaruhi variabel lainnya.

Berdasarkan teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, memberikan deskripsi statistic, menunjukkan hubungan serta pengaruh antara kompetensi aparatur pemerintah desa dan pengendalian internal terhadap pengelolaan laporan keuangan desa.

Operasional Variabel

Variabel independen (bebas) menurut Sugiyono (2017:61) adalah: “variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”.

Dalam penelitian ini variabel independen atau variabel bebas yang akan diteliti adalah Kompetensi Aparatur Desa (X_1) dan Pengendalian Internal (X_2).

Menurut Sugiyono (2018:61) variabel terikat (dependen) adalah:

“Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Dalam penelitian ini variabel yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah Pengelolaan Keuangan Desa.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.

Sampel dalam Penelitian ini adalah Menurut Sugiyono (2018:120) probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode teknik simple random sampling yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel / jumlah sampel

N = Ukuran Populasi

e = Derajat Ketelitian atau nilai kritis yang diinginkan, e = 0,10

Berdasarkan rumus diatas dapat dihitung jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{150}{1 + 150 (0,10)^2}$$

$$n = 60 \text{ Sampel}$$

Dari perhitungan diatas maka, jumlah sampel yang diambil yaitu sebanyak 60 sampel. Adapun pembagian sampel nya sebagai berikut:

Tabel 1 Sampel Penelitian

No	Nama Desa	Jumlah Aparatur
1	Bangunjaya	4
2	Bangunkarya	4
3	Bojong	4
4	Bojongkondang	4
5	Bungur Raya	4
6	Cimanggu	4
7	Cisarua	4
8	Jadikarya	4
9	Jadimulya	4
10	Jayasari	4
11	Karangkamiri	4
12	Langkaplancar	4
13	Mekarwangi	4
14	Pangkalan	4
15	Sukamulya	4
	Jumlah	60

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018:309) Teknik pengumpulan data adalah: “Langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”.

Penelitian ini memperoleh data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- Kuesioner

Menurut Sugiyono (2018:199) Kuesioner merupakan “Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”.

Penyebaran kuesioner dilakukan pada 15 Desa di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Untuk mempermudah perhitungan setiap pertanyaan dari hasil kuesioner mempunyai 5 (lima) kemungkinan jawaban yang diberi skor berdasarkan skala ordinal. Untuk jawaban yang mendukung pertanyaan atau pernyataan diberi skor tertinggi dan untuk jawaban yang tidak mendukung pertanyaan atau pernyataan diberi skor terendah.

Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Validitas menunjukkan kinerja kuesioner dalam mengukur apa yang diukur. Untuk menguji apakah instrument yang digunakan valid atau tidak dengan menggunakan korelasi pearson.

2. Uji Reliabilitas

Uji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach's Alpha*, yaitu dengan menggunakan program *Social Science (SPSS) V.25.0 for windows*, menggunakan metode *alphacronbach's* yang akan menghasilkan nilai alpha dalam skala 0 – 1, yang dapat dikelompokkan dalam lima kelas.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau terikat. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah variabel tersebut berhubungan positif atau negative dan untuk memprediksi nilai dari variabel tersebut mengalami kenaikan atau penurunan.

4. Analisis Koefisien Determinasi Simultan

Koefisien determinasi dengan symbol r^2 merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Definisi berikutnya menyebutkan bahwa r^2 merupakan rasio variabilitas nilai-nilai yang dibuat model dengan variabilitas nilai data asli. Analisis determinasi simultan digunakan untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel kompetensi aparatur pemerintah desa (X1) dan pengendalian internal (X2) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) secara simultan.

5. Uji Parsial (Uji-t)

Uji signifikan parsial (Uji-t) digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel independen dan dependen. Uji t ini dilakukan dengan membandingkan antara t statistik (nilai t yang dihasilkan dari proses regresi) dan nilai t yang diperoleh dari tabel.

6. Uji Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan (Uji-F) digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa dan pengendalian internal terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan sah atau tidaknya suatu pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mengukur instrument yang seharusnya diukur. Nilai R tabel untuk n=60 responden dengan taraf signifikansi 5% , sehingga didapat nilai r tabel 0.2542. Hasil uji validitas disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa

Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
P1	0,265*	0,040	Valid
P2	0,408**	0,001	Valid
P3	0,528**	0,000	Valid
P4	0,634**	0,000	Valid
P5	0,508**	0,000	Valid
P6	0,367**	0,004	Valid
P7	0,725**	0,000	Valid
P8	0,492**	0,000	Valid
P9	0,535**	0,000	Valid
P10	0,436**	0,001	Valid
P11	0,401**	0,002	Valid
P12	0,477**	0,000	Valid

Sumber: data primer diolah tahun 2020

Tabel 2 menunjukkan semua pertanyaan untuk variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dinyatakan valid karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,2542

dengan nilai signifikansi 5% dan n sebanyak 60 orang responden. Hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan yang diajukan terhadap responden valid.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Pengendalian Internal

Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
P1	0,411**	0,001	Valid
P2	0,512**	0,000	Valid
P3	0,699**	0,000	Valid
P4	0,693**	0,000	Valid
P5	0,624**	0,000	Valid
P6	0,774**	0,000	Valid
P7	0,638**	0,000	Valid
P8	0,590**	0,000	Valid
P9	0,772**	0,000	Valid
P10	0,665**	0,000	Valid
P11	0,526**	0,000	Valid
P12	0,629**	0,000	Valid
P13	0,447**	0,000	Valid
P14	0,569**	0,000	Valid
P15	0,664**	0,000	Valid
P16	0,474**	0,000	Valid
P17	0,682**	0,000	Valid
P18	0,667**	0,000	Valid
P19	0,600**	0,000	Valid
P20	0,734**	0,000	Valid

Sumber: data primer diolah tahun 2020

Tabel 3 menunjukkan semua pertanyaan untuk variabel Pengendalian Internal dinyatakan valid karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,2542 dengan nilai signifikansi 5% dan n sebanyak 60 orang responden. Hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan yang diajukan terhadap responden valid.

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
P1	0,774**	0,000	Valid
P2	0,779**	0,000	Valid
P3	0,832**	0,000	Valid
P4	0,809**	0,000	Valid
P5	0,797**	0,000	Valid
P6	0,750**	0,000	Valid
P7	0,876**	0,000	Valid
P8	0,809**	0,000	Valid
P9	0,616**	0,000	Valid
P10	0,717**	0,000	Valid
P11	0,749**	0,000	Valid
P12	0,794**	0,000	Valid
P13	0,794**	0,000	Valid
P14	0,715**	0,000	Valid
P15	0,771**	0,000	Valid
P16	0,869**	0,000	Valid
P17	0,837**	0,000	Valid
P18	0,676**	0,000	Valid

Sumber: data primer diolah tahun 2020

Tabel 4 menunjukkan semua pertanyaan untuk variabel Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan valid karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,2542 dengan nilai signifikansi 5% dan n sebanyak 60 orang responden. Hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan yang diajukan terhadap responden valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian. Suatu instrument penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach alpha* berada diatas 0,4. Uji reabilitas dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
1	Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa	0,468	12	<i>Reliable</i>
2	Pengendalian Internal	0,930	20	<i>Reliable</i>
3	Pengelolaan Keuangan Desa	0,960	18	<i>Reliable</i>

Sumber: data primer diolah tahun 2020

Tabel 5 menunjukkan nilai *cronbach's alpha* bahwa pertanyaan yang diajukan bersifat reliabel dengan rincian yaitu variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa sebesar 0,468. Pengendalian Internal sebesar 0,930, dan Pengelolaan Keuangan Desa sebesar 0,960. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.798	7.806		2.408	.019
	Total_PX1	.296	.123	.230	2.401	.020
	TOTAL_PX2	.537	.082	.625	6.525	.000

a. Dependent Variable: TOTAL_PY1

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada Tabel 6 diatas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$PKD = 18,798 + 0,296 K + 0,347 PI$$

Rumus diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 18,798 menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah desa, pengendalian internal nilainya 0 maka pengelolaan keuangan desa memiliki tingkat sebesar 6,803.

- b. Nilai koefisien kompetensi aparatur desa (β_1) sebesar 0,296 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan kompetensi sebesar 1 kali maka pengelolaan keuangan desa akan meningkat sebesar 0,296 dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- c. Nilai koefisien pengendalian internal (β_2) sebesar 0,347 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan pengendalian internal sebesar 1 kali maka pengelolaan keuangan desa akan meningkat sebesar 0,347 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Analisis Koefisien Determinasi Simultan

Pengujian determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi dengan kata lain, hasil yang diperoleh dari pengujian determinasi adalah angka yang digunakan untuk melihat persentase pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Pengujian determinasi dapat dilihat dari pengujian determinasi parsial dan simultan. Pengujian determinasi dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 7 Uji Determinasi Simultan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.741 ^a	.549	.533	5.14599

a. Predictors: (Constant), PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DESA

Sumber: data primer diolah tahun 2020

Hal tersebut menunjukan bahwa 74,1% Pengelolaan Keuangan Desa dipengaruhi oleh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, dan Pengendalian Internal sedangkan 25,9% lainnya ditentukan oleh faktor lain yang tidak dijadikan objek penelitian dalam penelitian ini.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 dengan jumlah n (responden) adalah 60 orang, maka T_{tabel} telah ditentukan sebesar 2.00324 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka, H_a diterima dan H_0 ditolak (berpengaruh).

- b. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka, H_a ditolak dan H_0 diterima (tidak berpengaruh).

Untuk melihat hasil uji t tersebut, maka disajikan sebagai berikut :

Tabel 8 Hasil Uji T
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.798	7.806		2.408	.019
	Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa	.296	.123	.230	2.401	.020
	Pengendalian Internal	.537	.082	.625	6.525	.000

a. Dependent Variable: PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Sumber: data primer diolah tahun 2020

Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa :

- Variabel X1 (Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa) memperoleh signifikansi 0,007 $< 0,020$ dan T_{hitung} sebesar 2,401 $> 2,00234$ (T_{tabel}), maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
- Variabel X2 (Pengendalian Internal) memperoleh signifikansi 0,000 $< 0,05$ dan T_{hitung} sebesar 6,525 $> 2,00234$ (T_{tabel}), maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukan bahwa Pengendalian Internal juga berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Hasil Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan (simultan) yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 dengan jumlah n (responden) adalah 60 orang, maka F_{tabel} telah ditentukan sebesar 2.79 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka, H_a diterima dan H_0 ditolak (berpengaruh).

- b. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka, H_a ditolak dan H_0 diterima (tidak berpengaruh).

Untuk melihat hasil uji F tersebut, maka disajikan sebagai berikut :

Tabel 9 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1835.505	2	917.752	34.657	.000 ^b
	Residual	1509.428	57	26.481		
	Total	3344.933	59			

a. Dependent Variable: PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

b. Predictors: (Constant), KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DESA, PENGENDALIAN INTERNAL

Sumber: data primer diolah tahun 2020

Tabel 9 tersebut menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 secara bersamaan memperoleh signifikansi $0,000 < 0,05$ dan F_{hitung} sebesar $34,657 > 2,79$ (F_{tabel}) hal ini mengandung arti bahwa seluruh variabel independen yaitu Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Pengendalian Internal berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

KESIMPULAN

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada hasil dari penelitian mengenai pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Pengendalian Intenal Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa :

1. Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Artinya kompetensi dari setiap aparatur pemerintah desa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Artinya, pengendalian yang diberlakukan dalam suatu instansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Berdasarkan Uji F yang diperoleh bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Pengendalian Internal secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Artinya, kompetensi yang di miliki aparatur pemerintah desa dan pengendalian internal yang di berlakukan dalam suatu instansi secara simultan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa se-Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Y. 2016. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Pada Dinas Kota Bandung). *Skripsi*. Elib. unikom.
- Devi. 2016. Pengaruh Kinerja Aparatur, Pengelolaan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Good Government Governance. *Skripsi*. Kudus: Program Studi Akuntansi Universitas Pasundan.
- Ferina, I. 2016. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Hir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*. Vol.14, No.3. Hal.321-336.
- Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan pertama. Yogyakarta: UII Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sugiyono (2016), *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung:Alfabeta.
- Sakaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiarti, Ekasari dan Ivan Yudianto. 2017. *Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Padjjaran: Bandung
- Umar, Husain. (2003). *Metode Penelitian, Cetakan Kelima*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wahyuningsih, S. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi keuangan Daerah dan Pengawasan Intern terhadap Kualitas laporan Keuangan Daerah*. *Skripsi*. Kudus:Program Studi Akuntansi Universitas Muria Kudus.
- Widyatama, dkk. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Volume 2, Nomor 2*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia STIE Panca Bhakti Palu: Sumatra*.

- Zeyn, E. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan. Vol.1, No.1, Hal.21-37.*
- Zirman, dkk. 2010. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi 18.*